

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi adalah sebuah kata yang sering kali kita ucapkan ketika kita membahas soal negara. Pemahaman demokrasi ini terbentuk karena adanya kontrak sosial, pembagian kekuasaan dan pada hakikatnya demokrasi merupakan usaha untuk menjatuhkan kekuasaan monarki atau pemerintahan yang absolut. John Locke, Rousseau dan Huntington merupakan tokoh politik yang memperjuangkan hak – hak politik rakyat. Pada akhir abad ke-19 gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkret sebagai program dan sistem politik.¹ Demokrasi pada tahap ini semata – mata bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas asas – asas kemerdekaan individu, memiliki hak yang sama dan dapat diwujudkan prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politis serta melibatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan/pembuatan keputusan secara kolektif.

Dalam sebuah negara demokrasi, Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu pilar utama demokrasi dengan tujuan untuk menentukan orang – orang yang akan memegang kekuasaan dan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Masyarakat pun berpartisipasi dalam proses politik tersebut, dengan kata lain mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik. Schumpeter dan Huntington mengatakan, yang mengandalkan persaingan yang

¹Mariam Budiardjo, *Dasar – dasar ilmu politik edisi revisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014, hlm. 112

adil dan partisipasi warga negara menentukan wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel, juga disebut demokrasi minimalis.²

Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem demokrasi pancasila, dimana sistem demokrasi ini harus berasaskan nilai – nilai pancasila. Pemilu sudah melekat pada negara Indonesia, pergantian kekuasaan secara periodik rutin dilaksanakan 5 tahun sekali. Indonesia sudah mengalami sejarah demokrasi yang cukup panjang. Masa demokrasi yang sudah dilalui setidaknya ada 4 masa, Masa Demokrasi Parlementer (1950 – 1959), Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965), Masa Demokrasi Pancasila (1966 – 1998), dan Masa Reformasi (1998 – sekarang). Pemilu yang dilakukan pada era Orde Lama dan era Orde Baru bisa dikatakan demokrasi minimalis, karena pemerintah hanya mengandalkan pemilu sebagai prosedur demokrasi semata dan pemilu pada masa ini tidak dilaksanakan secara demokratis dengan ditandai banyak kecurangan yang dilakukan saat penghitungan suara.

Demokrasi Pancasila dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto telah mencederai demokrasi, dengan membatasi hak – hak kebebasan rakyat untuk mengungkapkan pendapat, berserikat dan mendapatkan informasi. Dalam pemilu era orde baru merupakan pemilu yang tidak demokratis. Kekuasaan Soeharto pada era orde baru sangat kuat dan efektif. Soeharto memegang semua instrumen

² Mukthie Fadjar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 26

pemerintahan demi pembangunan nasional untuk meningkatkan ekonomi. Partai politik pun disederhanakan untuk memenangkan mutlak Golkar. Dwifungsi ABRI memberikan peran yang semakin luas untuk militer memasuki bidang politik dan kekaryaan.

Rakyat selama ini tidak pernah merasakan pesta demokrasi yang demokratis, tanpa terjadinya pemilu pun rakyat sudah mengetahui siapa pemenangnya. Pemilu yang terjadi hanya sebagai prosedur demokrasi agar rakyat merasa dilibatkan dalam politik. Ditambah lagi dengan ketidak berdayaan pers maka pemerintah menjadi satu – satunya aktor dalam sistem politik. Pihak eksekutif memiliki peran “super” penting dalam menjalankan pemerintahan yang represif.³

Pada 21 Mei 1998 Soeharto berhasil didesak mundur dari jabatannya. Dan dimulai era Reformasi di bawah kepemimpinan B.J. Habibie, sistem demokrasi kita telah berubah ke arah yang lebih demokratis. Presiden mulai membuka kebebasan mengeluarkan pendapat yang merupakan salah satu unsur demokrasi, dimana masyarakat tidak merasa takut berbeda pendapat. Pers tidak perlu takut lagi terjadi pembredelan dan memuat berita yang bertentangan dengan pemerintah karena pemerintah menjamin kebebasan pers itu sendiri.

Siring waktu, tak didapat di pungkiri bahwa bidang pendidikan dan teknologi yang semakin maju akan membuat masyarakat haus informasi. Teknologi merupakan media yang sangat efektif untuk memperkuat demokrasi, contoh hadirnya teknologi komunikasi dan internet membuat masyarakat mudah untuk

³ Arif Nasution, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000, hlm. 11

berkomunikasi jarak jauh antar individu maupun kelompok dan dapat mengakses informasi apa saja melalui media internet. Dengan ini partisipasi masyarakat terhadap politik semakin meningkat.

Habermas, Bohman, Dryzek, Putnam, mereka berpendapat bahwa Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) menawarkan perangkat untuk menerapkan teori mengenai demokrasi dan ruang publik, khususnya mengenai partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dan pertukaran deliberatif antara warga negara biasa dan elite politik. Dengan demikian, secara teori, internet memiliki potensi untuk pembaharuan dan pengembangan demokrasi. Sesuai tuntutan zaman yang modernis demokratis, pemerintah harus memberikan peluang sebesar – besarnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan dan pemilihan para wakil rakyat.⁴

Pada 4 Desember 2005 Indonesia menghadiri konferensi tingkat tinggi dunia tentang Masyarakat Informasi atau WSIS (World Summit on the Information Society) di Tunis. Melalui Menteri Kominfo (Komunikasi dan Informasi) saat itu, Sofyan A. Djali Indonesia telah menyetujui kesepakatan untuk mewujudkan Masyarakat Informasi di Indonesia. Sekretaris Jenderal PBB - Kofi Annan menyampaikan pesan bahwa WSIS adalah pertemuan/sidang untuk penyelesaian masalah (Summit of Solutions), untuk menjembatani atau mengubah masalah-masalah kesenjangan digital (digital divide) menjadi peluang digital (digital

⁴ Salim Alatas, *Media Baru Partisipasi Politik dan Kualitas Demokrasi*, Makalah dipresentasikan dalam Konferensi Nasional Komunikasi 2014, Batam 11 Maret 2014

opportunity), untuk mempromosikan perdamaian, pembangunan yang berkelanjutan, demokrasi, transparansi dan pengelolaan negara yang baik (good governance).⁵

Masa kepemimpinan Presiden Susiolo Bambang Yudhoyono yang kita kenal dengan SBY, ingin menghidupkan kembali Kelompencapir di masyarakat. Melihat keberhasilannya pada era Orde Baru Menteri Komunikasi dan Informasi pada saat itu Sofyan Djalil ingin membuat kelompok masyarakat yang aktif dalam mengakses informasi dan mengolah informasi untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, karena Indonesia adalah negara yang luas dan beraneka ragam budayanya yang pasti memiliki masalah tersendiri di tiap daerah. Maka pemerintah membuat program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Dalam kasus pemilu 2019, KIM dapat berperan aktif untuk mensukseskan pemilu 2019. Ini merupakan pemilu serentak pertama yang memiliki 5 jenis surat suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Masyarakat pasti merasa pemilu yang paling rumit karena harus mencoblos 5 surat suara dan mengenali para calon wakil rakyat dengan waktu yang singkat. KPU, Bawaslu dan DKPP merupakan lembaga penyelenggaraan pemilu yang men - sosialisasikan tata cara pemilu secara nasional. Tetapi sosialisasi itu tidak akan efektif jika hanya lembaga tersebut yang

⁵ Kominfo RI, 2006. *Dokumen Hasil Sidang Konferensi Tingkat Tinggi Dunia Mengenai Masyarakat Informasi Geneva 2003 - Tunis 2005*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

berperan aktif karena terbatasnya tenaga dan waktu. Harus ada lembaga masyarakat yang ikut berperan aktif untuk membatu sosialisasi pemilu 2019 dan mengawasi pelaksanaannya agar pemilu tahun 2019 berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER), Jujur dan adil (JURDIL).

KIM adalah lembaga yang strategis untuk memberikan informasi seputar tata cara pemilu 2019. Karena KIM berada di tengah – tengah masyarakat, jadi sangat efektif jika sosialisasi tersebut di bantu oleh KIM. Peran KIM memang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi saat pemilihan yang melancarkan informasi dari KPU ke masyarakat.

Oleh karenanya, melalui penelitian ini peneliti bermaksud memberikan gambaran mengenai bagaimana fungsi dan peran KIM kota Tasikmalaya dalam penyebarluasan informasi. Dalam penelitian ini juga dapat dilihat bagaimana program KIM ini mewujudkan masyarakat informasi di kota Tasikmalaya. Peneliti juga melihat latar belakang pembentukan KIM di kota Tasikmalaya, proses pembentukannya hingga sekarang dan program – program yang dijalankan KIM kota Tasikmalaya untuk mencapai terwujudnya masyarakat informasi. Di jelaskan juga apa saja hambatan – hambatan yang membuat fungsi dan peran KIM kota Tasikmalaya tidak maksimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti tulis maka saya menarik kesimpulan untuk rumusan masalah yaitu Bagaimana peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Tasikmalaya dalam Pemilu 2019?

C. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini penulis memberikan batasan masalah dengan tujuan agar penelitian ini terfokus dalam pembahasan dan analisis sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang ada. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: Fungsi dan Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Tasikmalaya dalam Pemilu 2019

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah: untuk mengetahui fungsi dan peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Tasikmalaya dalam Pemilu 2019

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian di bidang politik dan pemerintahan dalam memperkaya kajian teoritis mengenai demokrasi deliberatif dan komunikasi politik.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini setidaknya mempunyai 3 (tiga) bagian untuk beberapa pihak, yaitu bagi penulis, Universitas Siliwangi dan Masyarakat Luas.

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana belajar untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang didapat saat proses pendidikan dengan terjun langsung

ke lapangan sehingga dapat melihat dan merasakan fungsi dan peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

b. Bagi Universitas Siliwangi

Kegunaan praktis untuk Universitas Siliwangi adalah dalam melengkapi referensi bacaan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dan untuk bahan kajian penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat Luas

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat luas yang ingin menjadi anggota Kelompok Informasi Masyarakat dan berpartisipasi mensukseskan pemilu 2019